

KEBIJAKAN PEMERINTAH BRAZIL DALAM MENGHADAPI PENGUNGSI DARI VENEZUELA TAHUN 2018

Entis Sutisna¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRAK

Kawasan Pengungsi merupakan masalah besar bagi keamanan manusia dan keamanan global. Konflik situasi dan kondisi di Venezuela memaksa banyak orang untuk meninggalkan negaranya mencari kehidupan yang lebih baik di negara tetangganya, Brazil lebih baik dari negaranya. Pemerintah Brazil menangani permasalahan kemanusiaan pengungsi dengan menerapkan kebijakan Diplomasi antar kedua negara Brazil dan Venezuela, Operation Acolhida dan Operation Controle untuk mengamankan wilayah perbatasan tentang pengungsi karena merupakan ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara, yaitu: a) Pengungsi merupakan sumber konflik internasional, b) Pengungsi merupakan ancaman politik bagi negara penerima, c) Pengungsi yang ditakuti menjadi ancaman terhadap budaya nasionalisme, d) Pengungsi dapat menimbulkan konflik internasional. Pemerintah Brazil bersama militer Brazil khususnya Angkatan Udara dan badan-badan PBB (UNHCR) membantu para pengungsi tersebut. Tingginya angka (48%) keputusan Pengungsi untuk berintegrasi dengan masyarakat lokal dengan cara tinggal di Brazil adalah hal yang menarik. Studi ini mengkaji tentang peran organisasi-organisasi kemanusiaan tersebut dalam meningkatkan kehidupan yang layak bagi mereka selama tinggal di sekitar muara sungai di wilayah Brasil. Penelitian kualitatif ini mengadopsi perspektif pluralisme dan dianalisis dengan teori kerjasama internasional. Perannya adalah sebagai aktor. Data berasal dari jurnal, website, berita, dokumen resmi UNHCR, artikel dan buku lainnya. Studi ini menunjukkan pemerintah Brasil dan mitranya memainkan beberapa peran penting dalam menyelesaikan masalah pengungsi. Pengungsi di Brazil mempunyai tiga pilihan: kembali ke pemukiman asal, integrasi lokal, dan repatriasi sukarela. Yang mengejutkan, 48% memilih integrasi lokal. Kebijakan lain dari pemerintah Brazil dalam menghadapi pengungsi dari Venezuela adalah tentang Inklusi dan Integrasi Pengungsi, Brasil memberikan akses universal terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial tanpa memandang status hukum. Pemerintah Brazil memainkan peran inisiator dengan bekerja sama dengan militer Brazil dan Badan-badan PBB untuk mendapatkan dana yang cukup. Sebagai fasilitator dapat memenuhi kebutuhan dasar Pengungsi berupa makanan, air bersih, pelayanan kesehatan dan obat-obatan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, Diplomasi, Militer Brazil, Badan-Badan PBB.

ABSTRACT

The Refugee are big issues for human security and global security. Situation and condition conflicts in Venezuela forces many people to leave their country to seek better lives in their neighbour country, Brazil more better than their country. The Brazillian government handle diplomacy between two countries Brazil and Venezuela about refugees are with diplomacy, Operaton Acolhida and Operation Controle threat to a country's national security in border area, namely :a) Refugees are a source of international conflict, b) Refugees are a political threat to the receiving country, c) Refugees are feared to be a threat to the culture of nationalism, d) Refugees can cause international conflict. The Brazillian government with Brazillian military especially an Air Force and United Nations agencies (UNHCR) to help those Refugees. High number (48%) of Refugees decision to integrate with local people by living in Brazil is Interesting. This Study examined the roles of those humanitarian organization to foster their decent live while in their estuary in Brazil. This qualitative research adopted pluralism perspectives and analyzed with international cooperation theory. Its role as an actor. Data comes from journals, websites, news, official document UNHCR, Articles and another books. The Study Showed the Brazillian government and its partners for several important roles to settle the problems. Refugees in Brazil have three options: resettlement, local

integration, and voluntary repatriation. Surprisingly 48 % choose for local Integration. Another policy from The Brazillian government talks about diplomacy between two countries Brazil and Venezuela of refugees, Brazil provides universal acces to education, health services and social protection regardless of legal status. The Brazillian government played initiator role by cooperating with Brazillian military and United Nations Agencies to obtain enough funding. As facilitator can fulfil Refugees basic need for food, clear water, health service and medication.

Keywords: Policy, Government, Diplomacy, Brazilian Military, United Nations Agencies

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman globalisasi dunia terus berkembang seiring dengan perputaran waktu dan keadaan baik secara skala kecil maupun skala besar secara kompleks. Kestabilan dunia pada umumnya berpengaruh terhadap kehidupan di negara-negara baik negara maju, berkembang maupun negara yang terbelakang. Menurut Buzan, Weaver, dan Wilde dalam pengertian yang lebih modern, studi keamanan berfokus pada aktor non-negara dan ancaman non-militer. Buzan, Weaver, dan Wilde (1998). Studi keamanan yang modern disebut juga tidak hanya mengancam kedaulatan negara dan teritorialnya, tetapi juga mengancam keamanan masyarakat, baik kelompok maupun individu.

Salah satu negara yang menjadi bahan pembahasan yaitu negara Venezuela yang menjadi pengungsi di negara Brazil. Pengungsi Venezuela sudah lama menjadi permasalahan serius baik bagi negara Brazil maupun dunia internasional yang disebabkan oleh permasalahan yang telah menimpa pengungsi di negaranya. Bahkan, fenomena ini disebut sebagai krisis pengungsian eksternal terbesar dalam sejarah di Amerika Latin. (Chairunisyah, 2021).

Adanya beberapa akar permasalahan yang berkaitan dengan pengungsi Venezuela mengalami permasalahan yang menyebabkan arus pengungsi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, begitu besar dan tidak dapat terbendung dikarenakan adanya kondisi dinamika politik yang kacau, termasuk krisis ekonomi dan sosial yang parah, penindasan dan kegagalan demokrasi di Venezuela.

Rakyat Venezuela menghadapi pelbagai tantangan di negara penerima. Dengan adanya gejolak dalam pergantian pemerintahan di negaranya, rakyat Venezuela lebih memilih untuk meninggalkan negaranya dibandingkan harus mengalami krisis nasional.

Karena elemen-elemen ini akan tetap ada sepanjang tahun, arus pengungsi diperkirakan akan terus berlanjut dan bahkan meningkat pada tahun 2024 (Michael Swan, 2024).

Pengungsi itu sendiri merupakan seseorang yang telah melarikan diri dari negaranya sendiri karena kekhawatiran akan kekerasan, penindasan, konflik bersenjata, atau pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Mereka mencari perlindungan di negara lain karena tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara asal mereka karena alasan-alasan tersebut (Achmad Romsan, dkk, 2003).

Menurut Malcom Proudfoot dalam hal Perlindungan untuk pengungsi diatur oleh hukum internasional, dan pengungsi merupakan suatu kelompok orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa.

Dalam menangani persoalan terkait dengan pengungsi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk sebuah badan untuk menangani persoalan terkait dengan pengungsi yang dilindungi di dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Nama Badan tersebut adalah *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).

Badan ini telah hadir hampir di setiap negara di dunia untuk menangani persoalan pengungsi internasional yang menjadi fenomena di kalangan masyarakat internasional. UNHCR adalah lembaga internasional yang diberi mandat untuk memberikan perlindungan internasional dan solusi yang permanen terhadap para pengungsi dengan jalan membantu pemerintah- pemerintah, pelaku-pelaku lain ataupun organisasi-organisasi terkait untuk fasilitas pemulangan (repatriation) ataupun penempatan para pengungsi. Kedua aspek mandat UNHCR diatas terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan.

Seiring semakin meningkatnya skala operasi UNHCR, ruang lingkup kegiatan, dan permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi juga semakin rumit dan kompleks, meningkatnya jumlah para donatur maka kewenangan yang dimiliki UNHCR pun mengalami perubahan. UNHCR (2005). Dalam Konvensi Jenewa 1951 dan *Protocol New York* 1967 yang menyediakan kerangka kerja untuk pengakuan dan perlindungan bagi mereka yang diakui sebagai pengungsi. Para pengungsi memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak untuk tidak diusir secara paksa dari negara tempat mereka mencari

perlindungan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan penindasan, serta hak untuk mendapatkan akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan.

Tindakan Sementara 820/2018 pada Operação Acolhida (Operasi Selamat Datang) menetapkan sepuluh bidang prioritas: 1) perlindungan sosial; 2) pelayanan kesehatan; 3) menyediakan kegiatan pendidikan; 4) pelatihan dan kualifikasi profesional; 5) menjamin hak asasi manusia; 6) melindungi hak-hak perempuan, anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan komunitas tradisional yang terkena dampak; 7) penyediaan infrastruktur dan sanitasi; 8) penegakan hukum dan penguatan pengawasan perbatasan; 9) logistik dan distribusi bahan pokok; dan 10) mobilitas, persebaran dalam wilayah nasional, dan dukungan terhadap upaya relokasi. Kementerian Pertahanan, bekerja sama dengan lembaga-lembaga publik lainnya dan perwakilan masyarakat sipil terorganisir, memulai upaya pada bidang-bidang prioritas ini melalui pelbagai tindakan. Dalam konteks inilah Angkatan Bersenjata Brazil, khususnya Angkatan Darat dan Angkatan Udara dikerahkan dalam Operasi Acolhida. Dr. Tassio Franchi (2018).

Melihat dari pelbagai fenomena yang ada tentang permasalahan pengungsi Venezuela yang ada di perbatasan negara Brazil dan Venezuela melalui gambar dan referensi yang ada di negara Brazil dan Venezuela mengakibatkan pengungsi yang berada di wilayah negara Brazil terutama di wilayah bagian Utara Brazil yaitu negara bagian Roraima menjadi permasalahan serius bagi Pemerintah Brazil untuk menanganinya, Peneliti akan menjelaskan tentang cara atau proses kebijakan pemerintah Brazil yang diambil pada masa kepemimpinan Presiden Michel Miguel Elias Temer Lulia tahun 2018 terhadap pengungsi Venezuela yang berada perbatasan kedua negara Brazil dan Venezuela.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif dan didasarkan pada tinjauan pustaka dari pelbagai sumber untuk mendukung argumentasi penelitian ini. Data penelitian ini berasal dari pelbagai sumber yaitu Buku, Jurnal, Artikel, Website, dan sumber lain. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereview jurnal, website dan artikel yang memiliki pembahasan sejalan dengan penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*Library research*). Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian mengkorelasikannya satu sama lain untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan kemudian dengan menggunakan teori konsep yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang di teliti oleh penulis.

KERANGKA ANALITIK

Pendekatan Realisme

Dalam konteks politik kepentingan nasional, realisme merupakan pendekatan negara dalam mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kepentingan langsung dan konkritnya sendiri. Teori ini mengasumsikan negara adalah aktor utama di dunia internasional dan bertindak untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasionalnya. Komitmen Morgenthau dirangkum dalam enam prinsip umum realisme politik (Morgenthau, 1973: 3–13).

Beberapa elemen khas yang dalam realisme yang menjelaskan bahwa sifat manusia yang cacat; politik sebagai bidang kegiatan manusia yang otonom; prinsip-prinsip moral dengan nilai relatif, bukan universal. Di antara prinsip-prinsip ini, seseorang patut mendapat perhatian khusus. Enam prinsip realisme politik Hans J. Morgenthau: 1) Politik diatur oleh hukum obyektif yang berakar pada sifat manusia; 2) Konsep kepentingan nasional yang didefinisikan dalam istilah kekuasaan adalah tujuan kebijakan luar negeri yang paling penting; 3) Sementara kepentingan yang didefinisikan sebagai kekuasaan tetap tidak terpengaruh oleh perubahan historis; 4) Prinsip-prinsip moral universal tidak dapat digunakan untuk menilai tindakan negara dalam formulasi abstraknya, *Prudence* adalah moralitas yang pantas untuk politik; 5) *Real Realisme* politik menolak mengidentifikasi aspirasi moral suatu negara tertentu dengan hukum moral yang mengatur alam semesta; 6) Politik adalah bidang otonom, berbeda dari, dan tidak tunduk pada standar, ekonomi, hukum, moralitas dan sebagainya (Morgenthau, 1973: 3–13). Peneliti menggambarkan bahwa permasalahan Pengungsi Venezuela memerlukan suatu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Brazil melalui pendekatan realisme dalam

penanganannya karena berkaitan dengan kepentingan langsung dan konkritnya negara Brazil.

Adapun Pendekatan realisme yang digunakan negara Brazil dalam hal penerapan kebijakannya mulai dari pelaksanaan Diplomasi antar kedua negara Brazil dan Venezuela, penerapan Operation Acolhida dan Operation Controle bertujuan sebagai

- 1) *Power/Kekuasaan*. Diplomasi merupakan kekuatan bagi bangsa yang menggunakan diplomasi untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan.
- 2) Untuk *Security/Keamanan*. Diplomasi berfungsi sebagai security bagi bangsa dan negara dari ancaman bangsa atau negara lain.
- 3) Agar Tidak terjadi saling menyerang antar negara maupun individu.
- 4) Sebagai *Balance of Power* dengan negara Venezuela.

Konsep Pengungsi Venezuela

Pengungsi adalah orang yang melakukan migrasi dari suatu negara ke negara lain untuk mencari perlindungan dan tempat yang aman. Dunia menghadapi permasalahan akibat tidak tertanganinya jumlah pengungsi yang terus- menerus meningkat. Terhadap permasalahan pengungsi tersebut, terdapat nilai- nilai kemanusiaan yang dapat digunakan untuk merespon permasalahan tersebut (Rahmawati Putri, 2023).

Negara Brazil merupakan negara penandatanganan pakta internasional yang melibatkan hak asasi manusia, khususnya dalam hal pengungsian, yang mendefinisikan, melindungi dan menjaga hak-hak pengungsi di tingkat global dengan tujuan agar mereka diakui sebagai subyek yang memiliki hak. dan jaminan. Konvensi tersebut adalah Konvensi tahun 1951 dan protokolnya tahun 1967 di tingkat global, serta Deklarasi Cartagena tahun 1984 di tingkat Amerika Latin (Carvalho, 2020).

Konsep Kebijakan Negara Brazil

Konsep kebijakan yang dilakukan oleh Peneliti membahas tentang bagaimana cara atau implementasi Pemerintah Brazil menghadapi pengungsi dari Venezuela tahun 2018. Peneliti menuangkan dan menggunakan konsep Kebijakan Pemerintah Brazil melalui penerapan kebijakan Diplomasi yang dilakukan antara negara Brazil dan Venezuela, Operation Acolhida dan Operation Controle.

Peneliti menyusun penelitian tidak melaksanakan konsep baik itu input dan output akan tetapi menyampaikan bagaimana proses yang dilakukan Pemerintah Brazil dalam

menangani dan menghadapi Pengungsi Venezuela di tahun 2018. Hubungan diplomatik dengan negara Venezuela Brazil berpegang teguh pada Undang-Undang Pengungsi: Brazil memiliki kerangka hukum yang mendukung perlindungan pengungsi, termasuk hukum yang mengadopsi Konvensi PBB tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Brazil berkomitmen untuk melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka sesuai dengan standar internasional. Kontribusi: telah menulis tentang kebijakan migrasi dan hubungan internasional, termasuk bagaimana Brazil menangani krisis pengungsi dalam konteks diplomasi regional dan global (Sérgio Costa, 2017).

Operasi Acolhida: Pada tahun 2018, Brazil meluncurkan Operasi Acolhida, sebuah inisiatif besar untuk mengelola arus masuk pengungsi Venezuela. Operasi ini melibatkan penyediaan bantuan kemanusiaan, tempat tinggal, dan dukungan logistik di daerah-daerah perbatasan, seperti di kota Boa Vista dan Pacaraima di negara bagian Roraima.

Operasi Kontrol : Beberapa poin kunci tentang kebijakan dan operasional terkait hubungan antara pemerintah Brazil dan Venezuela dalam penanganan krisis pengungsi: **1) Kebijakan Pengawasan dan Perlindungan Pengungsi:** Koordinasi dan Penegakan Hukum: Brazil, dalam upayanya untuk mengelola arus pengungsi Venezuela, menerapkan kebijakan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua pengungsi yang memasuki negara tersebut mendapatkan perlindungan sesuai dengan hukum internasional. Ini termasuk penerapan kebijakan pendaftaran dan penilaian status pengungsi secara efektif. **2) Program Perlindungan Temporer:** Pada tahun 2018, Brazil menerapkan Program Perlindungan Temporer untuk pengungsi Venezuela, yang memberikan hak tinggal sementara dan akses ke layanan dasar. Program ini dirancang untuk membantu mereka berintegrasi sambil menunggu proses pengakuan status pengungsi yang lebih permanen. **3) Kerja Sama dan Diplomasi: Hubungan Diplomatik:** Dalam hal kebijakan pengawasan, Brazil juga harus mempertimbangkan hubungan diplomatiknya dengan Venezuela. Situasi politik yang tegang antara kedua negara dapat mempengaruhi tingkat kerja sama dan dialog terkait pengelolaan arus pengungsi, Kerja Sama Internasional: Brazil bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional, seperti UNHCR dan IOM, untuk menangani krisis pengungsi. Castro menyoroti bagaimana kerja sama internasional membantu memperkuat operasi pengawasan dan mendukung kebijakan pemerintah Brazil. **4) Tantangan dan Masalah**

dalam Pengawasan: Pengecekan dan Pengendalian Arus Pengungsi: Castro membahas tantangan yang dihadapi dalam pengawasan arus pengungsi, termasuk pengelolaan titik masuk, pendaftaran, dan pemantauan kondisi pengungsi di tempat penampungan, Sumber Daya dan Infrastruktur: Masalah terkait dengan sumber daya dan infrastruktur untuk menangani pengungsi mungkin menjadi fokus. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di daerah perbatasan, seperti Roraima, sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan; **5) Respon Terhadap Krisis Humaniter:** Pendekatan Humaniter: Castro kemungkinan menyoroti pendekatan humaniter Brazil dalam merespons krisis pengungsi, yang mencakup upaya untuk memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.

Kebijakan Brazil pada tahun 2018 mencerminkan pendekatan proaktif dalam menangani krisis pengungsi, dengan penekanan pada perlindungan kemanusiaan dan koordinasi internasional. Namun, seperti dalam situasi krisis pengungsi lainnya, pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan adaptasi dan perbaikan berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan

Penelitian yang sudah ada diklasifikasikan menjadi tiga, yang membahas tentang kebijakan pemerintah, pertama membahas tentang Diplomacy antar kedua Negara Brazil dan Venezuela, Sergio Costa (2017), Patricia Leavy (2017), Carolina Cordeiro Viana dan Alexandro Eugenio Pereira (2019), Arielle Arry Carvalho (2020), Krismawaty, (2021), Celso Castro, Eduardo Mello dan Carolina Soares Sousa (2022), Sabrina E. Medeiros, Ana Luiza Bravo E. Paiva, dan Cintiene Sandes M. Mendes, (2023). kedua membahas tentang Operasi Acolhida Sergio Costa (2017), Patricia Leavy (2017), (Asty Meydyanti (2019), Arielle Arry Carvalho (2020), Agatha Picetti Goncalves, dan Bruna Alfonso Ferreira Maciel (2021), Krismawaty (2021), Celso Castro, Eduardo Mello dan Carolina Soares Sousa (2022), dan Sabrina E. Medeiros, Ana Luiza Bravo E. Paiva, dan Cintiene Sandes M. Mendes, (2023), ketiga membahas tentang Operasi Control, Sergio Costa (2017), Patricia Leavy (2017), (Asty Meydyanti (2019), Arielle Arry Carvalho (2020), Agatha Picetti Goncalves, dan Bruna Alfonso Ferreira Maciel (2021), Krismawaty (2021), Celso Castro, Eduardo Mello dan Carolina Soares Sousa (2022), dan Sabrina E. Medeiros, Ana Luiza Bravo E. Paiva, dan Cintiene Sandes M. Mendes, (2023).

Dari beberapa pengklasifikasian kebijakan diatas Penelitian memerlukan pembahasan kebijakan yang dianggap penting oleh Pemerintah Brazil dalam menghadapi pengungsi dari Venezuela pada tahun 2018 tersebut.

Operação Acolhida (Operasi Selamat Datang)

Menurut data dari situs web Operação Acolhida, banyak pengungsi dan imigran tinggal di negara Brazil, sebuah kontingen yang tidak terduga dan, tanpa struktur mereka sendiri berada di kota-kota yang menerima mereka, menghadapi risiko tidak mendapatkan bantuan, hal ini mengkhawatirkan pemerintah setempat. pemerintah dan pemerintah federal, memastikan bahwa langkah-langkah mendesak diambil sehingga rakyat Venezuela mendapat jaminan tingkat kesejahteraan sosial untuk mempertahankan harapan dan martabat mereka.

Pada tahun 2016, atas inisiatif pemerintah federal, negosiasi dilakukan mengenai langkah-langkah yang harus diambil sehubungan dengan pertumbuhan pengungsi Venezuela ke Brazil, termasuk melaksanakan operasi kontrol dan konsekuensinya bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2018, Operasi Acolhida dimulai, dengan tujuan utama memberikan bantuan kepada manajer kota dan negara bagian di Roraima dalam menyelesaikan krisis yang timbul, menjadi operasi bantuan kemanusiaan terbesar di Amerika Selatan, dalam konteks antarlembaga, yang sejalan dengan format global baru dalam menghadapi peningkatan pengungsi manusia yang semakin meningkat (Bijos dan de Oliveira, 2020).

Rancangan Operasi Acolhida Krisis kemanusiaan yang dialami rakyat Venezuela saat ini disebabkan oleh serangkaian peristiwa sejarah, yang terjadi seiring berjalannya waktu, dan semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Pada akhir abad ke-20, Venezuela menampilkan sebagai negara yang semakin menjanjikan, dengan pembangunan manusia yang lebih unggul dibandingkan negara-negara tetangganya di Amerika Selatan, menjadi negara yang makmur dalam keseimbangan ekonomi, dengan minyak sebagai basis perekonomiannya, dan jumlah penduduknya memiliki kesejahteraan sosial tertentu, namun mengingat memburuknya situasi politik, ekonomi dan sosial dalam beberapa tahun terakhir, dan mengguncang hubungan eksternal, negara ini mengalami krisis yang sulit diselesaikan, memberlakukan pembatasan komersial, dan memburuknya standar hidup, jumlah penduduk,

meningkatnya pengangguran, penganiayaan politik, dan kondisi ini mendorong penduduknya untuk mencari, melalui imigrasi, suatu pilihan untuk mendapatkan kondisi kehidupan yang lebih baik. Leila Bijos dan Josemberg Magno de Oliveira (Abad 19).

Operação Controlez (Operasi Pengawasan).

Penerapan Operação Controlez (Operasi Pengawasan) terdahulu yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Brazil dengan menerapkan Operação Controle diluncurkan sebagai respons terhadap arus besar pengungsi Venezuela yang melarikan diri dari krisis politik dan ekonomi di negara mereka. Krisis ini menempatkan tekanan besar pada negara-negara tetangga, termasuk Brazil. Operação Controle dirancang untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang terkoordinasi, mengelola arus pengungsi, dan menyediakan perlindungan sementara. Costa menyoroti tujuan utama operasi ini, termasuk penyediaan tempat tinggal, makanan, dan layanan dasar bagi pengungsi di sekitar wilayah perbatasan.

Penerapan Kebijakan dan Implementasi: meneliti bagaimana pemerintah Brazil, bersama dengan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah, mengoordinasikan pelaksanaan Operação Controle. Ini termasuk pendaftaran pengungsi, pengelolaan tempat penampungan, dan distribusi bantuan. Pendekatan Terpadu: menggarisbawahi pentingnya pendekatan terpadu dalam menerapkan kebijakan pengawasan. Koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga internasional merupakan kunci dalam memastikan respons yang efektif terhadap krisis (Sérgio Costa, 2014).

PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Diplomacy antara Negara Brazil dan Venezuela

Perkembangan Penerapan diplomasi antara Brazil dan Venezuela selalu berhasil dan terhindar dari segala konflik jenis apa pun. Yang ada hanya konflik ringan yang dapat diselesaikan secara ringan. Permasalahan yang timbul diantaranya hanya penutupan atau pemblokiran jalan yang menuju perlintasan perbatasan antara wilayah Venezuela dan Brazil bagian utara baik Roraima dan Pacairama. Celso Castro; Eduardo Mello; Carolina Soares Sousa (2020).

Menurut Carolina Cordeiro Viana dan Alexandro Eugenio Pereira (2019), Kebijakan penerapan Diplomasi Brazil dan Venezuela mengenai pengungsi mencerminkan kompleksitas hubungan bilateral dan tantangan yang dihadapi Brazil sebagai negara penerima pengungsi (Viana dan Pereira, 2019). Beberapa poin utama mengenai penerapan kebijakan diplomasi terkait pengungsi adalah sebagai berikut:

1) Respons Humaniter Brazil: Brazil, di bawah kepemimpinan Presiden Michel Temer dan kemudian Jair Bolsonaro, mengadopsi pendekatan humaniter terhadap krisis pengungsi Venezuela. Pemerintah Brasil, terutama melalui lembaga seperti Institut Nasional untuk Imigrasi (INM) dan Kementerian Luar Negeri, berusaha memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk perlindungan, akses ke layanan dasar, dan program integrasi sosial bagi pengungsi Venezuela,

2) Kebijakan Terbuka dan Legislatif: Brazil menerapkan kebijakan terbuka dalam menerima pengungsi Venezuela, yang diatur melalui peraturan yang mempermudah proses permohonan suaka dan memberikan akses kepada layanan sosial. Kebijakan ini mencakup penyediaan tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam hal ini, Brasil mengikuti prinsip-prinsip perlindungan internasional dan hak asasi manusia yang diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

3) Koordinasi Multilateral: Diplomasi Brasil dalam menangani krisis pengungsi Venezuela juga melibatkan kerjasama multilateral. Brazil berkoordinasi dengan organisasi internasional seperti UNHCR (Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi) dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) untuk memastikan dukungan dan sumber daya yang memadai dalam menangani krisis ini. Kerjasama ini termasuk bantuan finansial dan teknis, serta dukungan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pengungsi.

4) Isu-isu Sosial dan Ekonomi: Viana dan Pereira mencatat bahwa sementara Brasil telah menunjukkan komitmen untuk menangani krisis pengungsi, negara ini juga menghadapi tantangan signifikan terkait dengan dampak sosial dan ekonomi dari arus pengungsi yang besar. Hal ini termasuk masalah terkait dengan kapasitas infrastruktur, integrasi sosial, dan penerimaan masyarakat terhadap pengungsi. Diplomasi Brazil mencakup upaya untuk mengelola dampak- dampak ini melalui kebijakan dan program-program yang mendukung integrasi pengungsi.

5) Tantangan dan Ketegangan: Penerapan kebijakan ini tidak tanpa tantangan. Ada ketegangan antara kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kekhawatiran mengenai dampak ekonomi dan sosial di komunitas lokal. Diplomasi Brazil seringkali harus menyeimbangkan antara memberikan dukungan kepada pengungsi dan mengatasi kekhawatiran domestik.

Secara keseluruhan, kebijakan diplomasi Brazil dalam menangani pengungsi Venezuela adalah refleksi dari upaya negara tersebut untuk mengelola krisis pengungsi dengan pendekatan yang humaniter dan terkoordinasi, sambil menghadapi tantangan yang muncul dari situasi krisis yang kompleks.

Brazil telah menerapkan pendekatan diplomatik yang beragam dalam menghadapi krisis Pengungsi Venezuela. Brazil dinilai bahwa di bawah pemerintahan berbeda, telah menggabungkan elemen bantuan kemanusiaan dengan upaya diplomatic yang lebih luas, mencoba untuk berkolaborasi dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional untuk menangani dampak krisis. Tantangan besar yang dihadapi Brazil terkait ketidakstabilan politik di Venezuela, bahwa posisi Brazil sering kali dihadapkan pada dilema antara mendukung perubahan politik di Venezuela dan menjaga hubungan diplomatik yang stabil dengan negara tersebut. Diplomasi Brazil harus melibatkan upaya koordinasi regional yang lebih luas untuk menghadapi tantangan yang bersifat lintas batas (Castro dkk., 2020).

Brazil mengelola krisis pengungsi Venezuela melalui pendekatan diplomatik yang cermat dan kebijakan kemanusiaan. Penerapan kebijakan ini mencerminkan upaya Brazil untuk menangani krisis dengan cara yang terkoordinasi dan berfokus pada perlindungan serta bantuan kepada pengungsi. Kebijakan Diplomasi Terbuka negara Brazil : mengadopsi kebijakan diplomasi terbuka terhadap pengungsi Venezuela. Pemerintah Brazil menganggap krisis ini sebagai masalah kemanusiaan dan berusaha untuk menunjukkan solidaritas dengan para pengungsi melalui kebijakan perlindungan yang inklusif. Dan Hubungan Bilateral: Walaupun hubungan diplomatik antara Brazil dan Venezuela mungkin mengalami ketegangan akibat situasi politik, Brazil berusaha menjaga dialog terbuka dengan pemerintah Venezuela untuk mengelola arus pengungsi. Ini termasuk upaya untuk berkoordinasi dalam masalah-masalah terkait perbatasan dan mobilitas pengungsi (Goncalves dan Maciel, 2020).

Kerjasama dengan Organisasi Internasional, Brazil bekerjasama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM dalam menangani krisis pengungsi. Koordinasi ini mendukung kebijakan diplomasi Brazil dan membantu dalam penyediaan bantuan serta dukungan teknis. Kolaborasi Regional Brazil juga terlibat dalam forum-forum regional untuk mengoordinasikan respons terhadap krisis pengungsi, seperti dalam konteks MERCOSUR (Pasar Bersama Selatan) dan forum regional lainnya (Goncalves dan Maciel, 2020).

Penerapan Kebijakan Operation Alcohida (Operasi Selamat Datang)

Sebuah program penting telah dikembangkan di Brazil untuk penerimaan pengungsi Venezuela. “Operação Acolhida”, yang dibuat pada tahun 2018, bertujuan untuk menjamin layanan kemanusiaan bagi orang-orang Venezuela, di pintu masuk utama Brazil, negara bagian Roraima. Kebijakan penerapan Operasi ini dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Federal, dengan dukungan negara bagian, badan-badan PBB, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil dan badan swasta.

Pengungsi yang ikut dalam operasi tersebut dibantu dalam hal identifikasi, orientasi, dokumentasi, jaminan hak, akses kesehatan dan tempat tinggal. Bantuan kesehatan terutama mencakup imunisasi dan bantuan darurat. Inisiatif ini mewakili kemajuan dalam penerimaan pengungsi, memberikan mereka sarana untuk kehidupan yang lebih baik.

Namun, pentingnya Sistem Kesehatan Masyarakat tidak tergantikan karena bantuan kesehatan yang diberikan hanya untuk kegiatan tertentu (Goncalves dan Maciel, 2020). Berdasarkan Doktrin Pertahanan Militer Brasil, Operasi Acolhida dapat dilihat sebagai pendekatan kemanusiaan dan skema gabungan dan antarlembaga.

Kombinasi karakteristik ini menjadikannya salah satu operasi militer paling relevan yang dilakukan di wilayah nasional. Kompleksitas yang terkandung dalam Operasi Acolhida melibatkan serangkaian persyaratan yang bersifat normatif-hukum, penugasan dan pengawasan internasional, serta kecerdikan logistik.

Pengakuan atas situasi kerentanan pengungsi terjadi melalui Keputusan Presiden No. 9285, tanggal 15 Maret 2018, dan dengan pembentukan Komite Bantuan Darurat Federal. Di kotamadya Pacaraima (di negara bagian Roraima RR), struktur berikut beroperasi dengan koordinasi antara Organisasi Pemerintah (GO), Organisasi

Internasional (IO), dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO): Pos Penerimaan dan Identifikasi, Dalam Negeri dan Pos Pemeriksaan, Pos Pelayanan Lanjutan, Pangkalan Pacaraima, Shelter Janokoida, dan Akomodasi BV-8 (Medeiros, dkk., 2023).

Penerapan Operação Acolhida dalam konteks kebijakan pemerintah Brazil untuk menangani krisis pengungsi Venezuela. Berikut adalah beberapa poin utama tentang penerapan Operação Acolhida menurut analisis Celso Castro:

1) Latar Belakang Operação Acolhida: Peluncuran dan Tujuan: Operação Acolhida diluncurkan pada bulan Februari 2018 sebagai respons terhadap krisis pengungsi Venezuela. Tujuannya adalah untuk menyediakan bantuan kemanusiaan yang terkoordinasi dan efisien, serta untuk mengelola arus pengungsi yang memasuki Brazil melalui negara bagian Roraima dan Amazonas, Fokus Operasional: Operasi ini berfokus pada penyediaan layanan dasar, termasuk tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan pendidikan, serta pendaftaran dan pengolahan klaim suaka;

2) Koordinasi dan Implementasi: Koordinasi Antar Lembaga: Menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah federal, negara bagian, dan lokal dalam pelaksanaan Operação Acolhida. Koordinasi ini penting untuk memastikan aliran bantuan yang efektif dan pemantauan yang tepat terhadap kondisi pengungsi, Kerja Sama dengan NGO dan Organisasi Internasional: Operação Acolhida melibatkan kerja sama erat dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga internasional seperti UNHCR (Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi) dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi). Kerja sama ini membantu dalam penyediaan bantuan tambahan dan dukungan teknis;

3) Aspek Humaniter dan Kemanusiaan: Penyediaan Bantuan Kemanusiaan: Operasi ini dirancang untuk memberikan bantuan segera kepada pengungsi, termasuk akses ke tempat tinggal sementara, makanan, dan layanan medis, pendekatan humaniter ini penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak pengungsi sambil menunggu pemrosesan lebih lanjut, Pendaftaran dan Status: Operação Acolhida juga mencakup proses pendaftaran yang sistematis untuk pengungsi, yang memungkinkan mereka mendapatkan status perlindungan sementara dan mengakses layanan dasar.

4) Tantangan dan Kritik: Sumber Daya dan Infrastruktur: menyoroti tantangan yang dihadapi dalam hal sumber daya dan infrastruktur, terutama di daerah

perbatasan yang seringkali kekurangan fasilitas yang memadai untuk menangani jumlah pengungsi yang besar, Isu Sosial dan Logistik: Beberapa kritik terkait dengan kondisi tempat penampungan dan kemampuan untuk memberikan layanan yang memadai di tengah tekanan yang meningkat.

Secara keseluruhan, analisis Celso Castro mengenai Operação Acolhida memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Brazil menangani krisis pengungsi Venezuela melalui pendekatan terkoordinasi dan berbasis humaniter, serta tantangan dan solusi yang terkait dengan pelaksanaan operasi tersebut.

Penerapan Operation Controllez (Operasi Pengawasan)

Dalam proses penerapan *Operation Controllez* tidak pernah ada konflik antara Brazil dan Venezuela. Sebaliknya, Satgas Logistik Kemanusiaan sama sekali tidak bersenjata. Brazil mempunyai Peleton Polisi Angkatan Darat yang berfungsi melindungi fasilitas, agen yang bekerja, dengan beberapa pengawasan.

Sejalan dengan *Operasi Acolhida*, Brazil memiliki *Operation Controllez*, yang bertanggung jawab untuk mencegah dan memberantas aktivitas terlarang lintas batas, yang dilakukan oleh Angkatan Darat Brazil, diwakili oleh Brigade Infanteri Hutan ke-1, yang telah berada di lokasi tersebut sejak tahun 1993, Brigadi Infanteri berasal dari Petropolis.

Satuan Tugas sepenuhnya bersifat kemanusiaan, tidak bersenjata. Berdasarkan kesatuan komando, ditentukan bahwa Brazil mengambil kendali. Apa yang saya lakukan? Kami menahan warga Venezuela yang berada di Brazil.

Dari 2.199 kilometer perbatasan Brazil dengan Venezuela, 958 kilometer berada di negara bagian Roraima saja. Negara Brazil hanya mempunyai satu titik penyeberangan lokal, yaitu Pacaraima, dan perbatasan kering yang luas. Brazil menempatkan Polisi Jalan Raya Federal, Polisi Federal, dengan kendaraan mereka, menghadap Brazil, untuk mengontrol pintu masuk (Castro, dkk., 2022).

Operation Controllez: Beberapa poin kunci tentang kebijakan dan operasional yang dibahas oleh Celso Castro terkait hubungan antara pemerintah Brazil dan Venezuela dalam penanganan krisis pengungsi:

1) Kebijakan Pengawasan dan Perlindungan Pengungsi: Koordinasi dan Penegakan Hukum: Brazil, dalam upayanya untuk mengelola arus pengungsi Venezuela,

menerapkan kebijakan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua pengungsi yang memasuki negara tersebut mendapatkan perlindungan sesuai dengan hukum internasional. Ini termasuk penerapan kebijakan pendaftaran dan penilaian status pengungsi secara efektif.

2) Program Perlindungan Temporer: Pada tahun 2018, Brazil menerapkan Program Perlindungan Temporer untuk pengungsi Venezuela, yang memberikan hak tinggal sementara dan akses ke layanan dasar. Program ini dirancang untuk membantu mereka berintegrasi sambil menunggu proses pengakuan status pengungsi yang lebih permanen.

3) Kerja Sama dan Diplomasi: Hubungan Diplomatik: Dalam hal kebijakan pengawasan, Brazil juga harus mempertimbangkan hubungan diplomatiknya dengan Venezuela. Situasi politik yang tegang antara kedua negara dapat mempengaruhi tingkat kerja sama dan dialog terkait pengelolaan arus pengungsi, Kerja Sama Internasional: Brazil bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional, seperti UNHCR dan IOM, untuk menangani krisis pengungsi. Castro mungkin menyoroti bagaimana kerja sama internasional membantu memperkuat operasi pengawasan dan mendukung kebijakan pemerintah Brazil.

4) Tantangan dan Masalah dalam Pengawasan: Pengecekan dan Pengendalian Arus Pengungsi: Membahas tantangan yang dihadapi dalam pengawasan arus pengungsi, termasuk pengelolaan titik masuk, pendaftaran, dan pemantauan kondisi pengungsi di tempat penampungan, Sumber Daya dan Infrastruktur: Masalah terkait dengan sumber daya dan infrastruktur untuk menangani pengungsi mungkin menjadi fokus. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di daerah perbatasan, seperti Roraima, sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan;

5) Respon Terhadap Krisis Humaniter: Pendekatan Humaniter: Castro menyoroti pendekatan humaniter Brazil dalam merespons krisis pengungsi, yang mencakup upaya untuk memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, Integrasi Sosial dan Ekonomi: Kebijakan pengawasan juga mencakup upaya untuk mengintegrasikan pengungsi ke dalam masyarakat lokal, termasuk akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

6) Reaksi dan Dampak Sosial: Dampak pada Komunitas Lokal: Kebijakan dan operasi pengawasan dapat memengaruhi masyarakat lokal di Brazil, baik secara sosial maupun ekonomi, membahas bagaimana pemerintah Brazil menangani reaksi masyarakat lokal terhadap kedatangan pengungsi dan upaya untuk mengurangi ketegangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat ditarik simpulan bahwa pengungsi Venezuela yang berada di wilayah perbatasan Brazil menimbulkan permasalahan dan bahkan ancaman bagi negara Brazil itu sendiri dikaitkan dengan keamanan global yang ada.

Pengungsi banyak yang meninggalkan negaranya untuk mencari tempat berlindung dan kehidupan yang lebih baik ke negara tetangga mereka, diantaranya yaitu Brazil terutama di wilayah Roraima bagian utara Brazil. Brazil merupakan negara yang berbatasan dengan Venezuela dan dapat dilalui melalui jalur darat, inilah salah satu alasan mengapa Brazil dipilih sebagai negara tujuan pengungsi Venezuela.

Adanya krisis Pengungsi Venezuela sebelum Brazil menerapkan kebijakan *Operation Acolhida* Brazil menerapkan kebijakan untuk mengatasi terhadap pengungsi dengan cara melakukan diplomasi dengan pemerintahan Venezuela agar mengatur tentang warga negaranya sebagai pengungsi yang akan melintas ke negara Brazil dianggap dapat menjadikan ancaman baik budaya, nasionalisme dan negara.

Program kebijakan *Operation Acolhida* atau disebut dengan Operasi Selamat Datang dengan menggunakan aset militer untuk transportasi udara dan penyaluran logistik serta untuk memperkuat wilayah perbatasan yang dilakukan bersama badan-badan PBB dan pemerintahan Venezuela.

Operation Acolhida dilaksanakan sesuai dengan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 serta bertindak sesuai dengan kapasitas dan hak mereka untuk memberikan bantuan tempat tinggal yang sangat dibutuhkan, bantuan makanan, program mata pencaharian, pengecekan kesehatan gratis serta proses interiorisasi.

Operation Acolhida diatur dalam 3 pilar yang berisikan kegiatan dari berbagai sektor, seperti bantuan langsung, perlindungan terhadap pengungsi dan proses relokasi untuk pengungsi.

Kebijakan Pemerintah Brazil dalam menangani pengungsi telah menunjukkan perannya dengan baik bersama mitra kerjanya melalui penerapan Diplomasi dengan negara Venezuela, selanjutnya Pemerinah Brazil bekerjasama dengan Pemerintah Venezuela melaksanakan melakukan penerapan kebijakan *Operation Controlez* atau kebijakan operasi pengawasan dan patroli Bersama antara pihak negara Brazil dan Venezuela.

Meskipun Brazil ada kemajuan dalam menangani para pengungsi akan tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk melindungi hak-hak pengungsi di Brazil.

SARAN

Saran-saran yang perlu disampaikan berkaitan dengan kebijakan pemerintah Brazil dalam menghadapi masalah pengungsi dari Venezuela di tahun 2018 diantaranya memerlukan pendekatan yang realisme dan berkelanjutan. Saran berikut adalah saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini:

1. Kesimpulan dalam Tesis ini dapat ditindaklanjuti dengan penelitian selanjutnya mengingat permasalahan pengungsi begitu kompleks. Penelitian di atas menjawab permasalahan pengungsi secara umum tentang proses yang dilakukan, sehingga terdapat banyak pertanyaan yang belum dijawab secara tuntas dan mendalam. Penelitian juga belum membenturkan permasalahan pengungsi dalam pelbagai aliran pemikiran Hubungan Internasional tentang input dan output yang harus digali. Penelitian selanjutnya dapat menysasar permasalahan pengungsi dari sudut input dan output terhadap kebijakan dan respon negara Brazil terhadap pengungsi Venezuela. Setiap negara memiliki kebijakan yang beragam sebagaimana digambarkan sebelumnya. Sangat menarik jika respon spesifik masing-masing negara dikuliti kemudian membandingkannya dengan nilai hubungan Internasional dan kebijakan- kebijakan yang diambil oleh suatu negara. Penelitian ini juga baru menjawab tentang cara atau proses terhadap permasalahan pengungsi secara umum. Belum terdapat jawaban lebih jelas bagaimana output yang dihasilkan dari kebijakan yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah Venezuela dan pemerintah Negara Brazil. Peran lembaga internasional lainnya dalam mengatasi permasalahan pengungsi ke dalam kondusifitas pengungsi yang relative aman dan tidak ada permasalahan. Di luar kedua ide tersebut diatas, beberapa ide lain pada isu

ini yang dapat diteliti selanjutnya seperti, analisis komparatif pengalaman pengungsi di pelbagai negara, dampak persepsi negara lain terhadap perlakuan pengungsi di negara-negara ameriks Latin, pengalaman pengungsi perempuan muslim, krisis pengungsi di negara-negara mayoritas muslim, dampak migrasi paksa terhadap identitas keagamaan pengungsi muslim, tantangan yang dihadapi pengungsi muslim dalam mengakses pendidikan dan kesempatan kerja di negara penerima suaka.

2. Bagi Pemerintah Brazil sebagai penerima pengungsi, semoga penelitian ini menjadi semangat untuk memajukan regulasi Negara Brazil untuk lebih perhatian kepada pengungsi. Semoga ke depan para Peneliti bisa memberikan solusi berkelanjutan kepada pengungsi. Bagi negara asal pengungsi, semoga lebih banyak lagi ruang dalam regulasi agar setiap orang di dunia ini bisa mengungsi dengan mudah jika diperlukan.

3. Bagi Institusi akademik, pihak pemerintah Brazil maupun Venezuela, termasuk organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan pengungsi. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada semua warga negara tentang kewajiban perlindungan pengungsi dan rekomendasi lainnya terkait perubahan kebijakan yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan.

4. Bagi Peneliti lain Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memahami lebih jauh permasalahan dan kebutuhan pengungsi. Termasuk mengurangi stigma negatif terhadap pengungsi. Apa yang diuraikan dalam tulisan ini hendak mengajak lebih banyak lagi diskusi dan penelitian terkait isu pengungsi dari perspektif Hubungan Internasional. Keseluruhannya ditujukan untuk memajukan dan membumikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai sumber pemecahan permasalahan sosial di dunia. Saran-saran ini semoga bisa menjadi titik awal dalam menyusun strategi yang komprehensif dalam menghadapi masalah pengungsi dari Venezuela di Brazil pada tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Celso Castro, Eduardo Mello, Carolina Soares Sousa (2022) *Operation Acolhida an oral history / (orgs.)*. - Rio de Janeiro : FGV Editora.
- JOM FISIP 8 (2020). *Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela. Refugee and Migrant Response Plan.*

- Achmad Romsan, dkk, (2003), Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, Bandung: Sanic Offset bekerja sama dengan UNHCR, Jakarta, hlm. 18.
- Agatha Picetti Gonçalves da Silva¹, Bruna Affonso Ferreira Maciel² (2021) Challenges in Refugees' Access to the public healthcare system in Brazil.
- Anggraeni, Kusumawardani & Faturachman. (2004). Nasionalisme. Buletin Psikologi, Tahun XII, No. 2.
- Anugerah, D. (2022). "Gaya Kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro sebagai Penyebab Krisis Migrasi di Venezuela". Jurnal Pendidikan Tambusai,
- Arif Rachman, Elisha Yochanan, Andi Ilham Samanlangi dan Hery Purnomo (January 2024) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
- Ary Putri Rahma Sari (2018) Potensi Geoekonomi Brazil dalam Mendukung Perekonomian Kawasan Amerika Latin.
- Arielle Arry Carvalho (2020) Analisis kinerja negara Brazil dalam menjamin Standar Peradaban Minimum bagi Pengungsi Venezuela dalam Konteks Operasi Penyambutan.
- Asty Meydianti, (2019). Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Venezuela di Brazil Tahun 2018-2019
- Bonizzoni P. (2018) 'Pengawasan perbatasan negara: Tinjauan tren terkini dalam bentuk pengendalian imigrasi terkait keluarga', J. Mulholland, N. Montagna, & E. Sanders-McDonagh (eds) Gendering Nationalism : Persimpangan Bangsa, Gender dan Seksulaitas , hal.223–239. Cham: Palgrave Macmillan.
- Buzan, B., & Waeber, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework For Analysis. London: Lynne Rienner Publishers.
- Buzan, B. (1997) 'The Timeless Wisdom of Realism?'. In International Theory: Positivism and Beyond, edited by Steve Smith, Ken Booth and Marysia Zalewski, pp. 47-65. London: Cambridge University Press. (Buzan, 1997: 53)
- Caroline Cordeiro Viana e Silva Alexandro Eugenio Pereira (2019) International Security and New Threats: Securitisation and Desecuritisation of Drug Trafficking at the Brazilian Borders

- Chairunisyah, A. (2021). "Peran United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Venezuela di Kolombia pada Tahun 2018- 2020".
- Ellis R. (2017) ."The Collapse of Venezuela and Impact on the Region". Military Review (Army University Press).
- Evina Mutia (2018) Email: evinamutia@gmail.com Upaya Brazil dalam Menangani Masalah Keamanan Perbatasan dengan Venezuela.
- Ferdinand, A. (2014). Metode penelitian: Pedoman penelitian untuk penulisan skripsi tesis dan desertasi ilmu manajemen.
- Gretchen B. Rossman dan Sharon F. Rallis, (2016) An introduction to qualitative research: Learning in the field, , Sage Publications.
- Guy Emerson (2014) Strong Presidentialism and the Limits of Foreign Policy Success: Explaining Cooperation Between Brazil and Venezuela. La Trobe University
- Iin Karita Sakharina, dan Kadarudin, (2016), Hukum Pengungsi Internasional, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 303
- Khoerunisa & Triyatno (2020). "Pola Migrasi Penduduk Venezuela di Amerika Latin pada Tahun 2015-2018. JSSP, 1(1).
- Krismawaty (2021) Peran Pemerintah Brazil dalam Menangani Pengungsi Venezuela di Brazil Supervisor: Dr. Umi Oktyari Retnaningsih, MA Email: krismawaty.27@gmail.com Bibliography.
- Leila Bijos dan Josemberg Magno de Oliveira (Abad 19) Operação Acolhida: Ajuda Humanitária Aos Venezuelanos Operation Welcome: Humanitarian Aid to Venezuelans
- Miles dan Huberman, (2010). Analisis Penelitian kualitatif. Miles Huberman Buku.
- Nainggolan. (2018). "Krisis Venezuela dan Migrasi Internasional". Poltak Partogi. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 10 (18): 2.
- Nina Nurdiani (2014) Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan nnurdiani@binus.edu, nina.nurdiani@yahoo.co.id
- Nuryanti & Salsabila. (2019). "Strategi Kebijakan Pemerintah Venezuela di Tengah Krisis". Sospol: Jurnal Sosial Politik 5 (2). uryantiedisuryansyah@gmail.com1, ilasalsabilaaaa@gmail.com2

- Rodrigues A. (2018). "Roraima Governor Asks to Shut Borders with Venezuela." *Agência Brazil*, April 16.
- Rahmawati Putri (2023) *Perlindungan Pengungsi Dalam Perspektif Al-Qur'an* Sabrina E. Medeiros, Ana Luiza Bravo e Paiva, dan Cintiene Sandes M. Mendes (2019) *What Kind of Mission Is That? The Brazilian Armed Forces' Performance In Non-Traditional Operations*
- Sandra V. Rozo (2021). *Kiat untuk mengumpulkan survei terhadap populasi yang sulit dijangkau* 14 Juli.
- Shannon Doocy Kathleen R (2019). *Venezuelan Migration and the Border health crisis in Colombia and Brazil*. Page Fernando de la Hoz, Paul Spiegel, Chris Beyrer.
- Sergio Costa (2014) *"Diplomacy and Migration: The Case of Brazil"*
- Sergio Costa (2017) *"The Politics of Human Rights and Migration in Brazil"*
- Sugiyono, P. D. (2019). *metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R& D dan penelitian pendidikan)*. *Metode Penelitian Pendidikan*, 67.
- Sulistya, E. (2022). "Upaya Pemerintah Kolombia dalam Menangani Pengungsi Asal Venezuela Tahun 2014-2018". *Journal Ilmu Hubungan Internasional* 9 (4).